

REFERENSI

- Atyanta, R. 2012. *Analisis Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Brawijaya Vol. 1 No. 1. Malang
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*. Jakarta
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design*. Sage Publications, Inc. 2014. California
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-48/PB/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2014 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Pada Masa Transisi Implementasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara Tahun 2014*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2010. *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-172/PB/2010 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2009*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2011. *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-106/PB/2011 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2010*. Jakarta

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2012. *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-212/PB/2012 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2011*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2013. *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-191/PB/2013 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2012*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2014. *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-248/PB/2014 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2013*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2015. *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-326/PB/2015 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2014*. Jakarta
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. 2014. *Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awal*. Jakarta
- Hanafi, M.M dan A. Halim. 2000. *Analisis Laporan Keuangan*. Unit Penerbitan dan Percetakan AMP-YKPN. Yogyakarta
- Hennink, M dkk. 2011. *Qualitative Research Methods*. Sage Publications Ltd, London
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Jonas, G.J & Blanchet, J. 2000, *Assessing Quality of Financial Reporting*. Accounting Horizons, vol. 14, no. 3, pp. 353-363.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dna Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara*. Jakarta
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Republik Indonesia. 2003. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Ritonga, I.T. 2010. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah (LKMPD), Sleman. Yogyakarta
- Sarah, R.A. 2014. *Opini Audit Dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Vol. 13. April 2014. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 2013. *Laporan Analisis Beban Kerja Kementerian Keuangan*. Jakarta

Sipahutar, H. dan S. Khairani. 2013. *Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang*. STIE MDP

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung